

ABSTRAK

Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui peranan saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi dan Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika golongan 1 di Pengadilan Negeri Slawi.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengertian yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat, dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sosiologis berarti bahwa di dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan mengetahui bagaimana ketentuan itu dilakukan.

keterangan saksi mahkota Diana dan Edi Wibowo dalam perkara tindak pidana Narkotika yaitu keterangan sah sebagai alat bukti karena sesuai pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa disumpah sebelum memberikan keterangan. Sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti karena diucapkan dimuka persidangan. Keterangan mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan terdakwa yang sesuai pasal 185 ayat (3) KUHAP. Tidak adanya hambatan yang berarti dalam perkara ini, Namun biasanya pada prakteknya untuk menjadikan terdakwa menjadi saksi mahkota ada 2 hambatan dalam persidangan yaitu terdakwa tidak mau untuk dijadikan sebagai saksi mahkota dalam perkara dimana ia juga sebagai terdakwa, karena takut perbuatan tindak pidana yang dilakukan akan terungkap dan penggunaan saksi mahkota menyulitkan atau mempengaruhi /kurang adilnya putusan hakim dan keterangan saksi mahkota bisa saja berisikan kebohongan karena untuk menutup-nutupi yang tujuannya untuk menyelamatkan terdakwa lain. Sarannya adalah perlu adanya regulasi yang mengatur tentang saksi mahkota. Dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang tentang hukum acara pidana tentang saksi mahkota dalam satu pasal tersendiri.

Kata Kunci : Keterangan Saksi, Saksi Mahkota, Peranan Saksi

ABSTRACT

The witness as stipulated in article 1 point 26 of the Criminal Procedure Code is a person who can provide information for the purposes of investigating, prosecuting and judging about a criminal case which he himself heard, he saw for himself and experienced by himself. evidence appeared called the crown witness. The term crown witness was indeed not found in the laws and regulations governing criminal procedural law in Indonesia, namely Law Number 8 of 1981 about criminal procedure law. but based on an empirical perspective, the crown witness is defined as a witness originating from or taken from one of the other suspects or defendants who jointly committed a criminal act, and in which case the crown was given. The purpose of this thesis is to determine the role of the crown witness in proving the case of narcotics crime in class 1 in the Slawi District Court and to find out what obstacles faced by the crown witnesses in proving criminal acts of class 1 narcotics in the Slawi District Court.

The approach method used is a sociological juridical approach method. Juridical understanding is intended to review, view, and analyze problems based on legal principles and principles. Sociology means that in conducting research based on existing provisions and knowing how the provisions are carried out.

the testimony of the crown witnesses of Diana and Edi Wibowo in the case of Narcotics crimes, namely legal information as evidence because in accordance with article 160 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code that was sworn before giving a statement. In accordance with article 185 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code that witness statements are valuable as evidence because they are pronounced before the trial. Information has conformity with other evidence, namely the statement of the defendant in accordance with article 185 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code. There were no significant obstacles in this case, but usually in practice to make the defendant a crown witness there were two obstacles in the trial, namely the defendant did not want to be made a crown witness in the case where he was also a defendant, fearing that the crime would be revealed and the use of crown witnesses makes it difficult or influential / unfair for judges' decisions and crown witness testimonies may contain lies due to cover-ups that aim to save other defendants. His suggestion is that there is a need for regulations governing the crown witnesses. Included in the draft law concerning criminal procedural law concerning crown witnesses in a separate article.

Keywords: *Witness Information, Crown Witness, The Role Of Witnesses*